



RANCANGAN KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025 KECAMATAN SOLOKURO

2025



KECAMATAN SOLOKURO

Jalan Raya Payaman Nomor 219
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
Handphone 085812349230
Email : kecsolokuro@gmail.com
www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, kami haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 OPD Kecamatan Solokuro ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini merupakan penjabaran dari Ranwal Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025 - 2029.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok OPD Kecamatan Solokuro tahun 2025

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini bermanfaat bagi pembangunan di wilayah Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Terima kasih atas kerja sama semua Pihak yang membantu sehingga pelaksanaan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Solokuro Tahun 2025 dapat di laporkan dan di pertanggung jawabkan

Solokuro, Mei 2025
CAMAT SOLOKURO



TRI MUKTI AGUNG WIJAYANTO, SE
Pembina
NIP.19681130 201001 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
2.1 Landasan Hukum	2
3.1 Maksud dan Tujuan	5
4.1 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN (RENJA) PERUBAHAN	
SKPD TAHUN 2025.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan (RENJA) Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra SKPD.....	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	30
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKKPD.....	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	60
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	60
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	60
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan (RENJA) Perubahan SKPD	60
3.3 Program dan Kegiatan.....	61
BAB IV RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH.....	62
BAB V PENUTUP.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Solokuro Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan OPD Periode untuk 1 (satu) tahun. Undang undang no 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD sebagai pedoman kerja Periode 1 (satu) Tahun yang berfungsi untuk menterjemahkan Perencanaan strategis lima Tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA OPD kedalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan “bersinergi” dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Solokuro Tahun 2025 mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, Proses Penyusunan Renja (RENJA) Perubahan OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Rentra OPD dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan .

4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan,

Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Dalam Prosesnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan solokuro mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal (RKPD). Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Solokuro dapat dilakukan Secara Simultan /Pararel dengan menyusun Rancangan Awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD Kecamatan Solokuro, evaluasi pelaksanaan RENJA OPD PERUBAHAN Tahun tahun sebelumnya dan evaluasi Kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan (RENJA) Perubahan OPD untuk menjadi pedoman dilingkungan OPD dalam menyusun Program dan kegiatan proiritas OPD pada tahun anggaran berkenan.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Solokuro Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026.
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Solokuro Tahun 2025, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan .

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip **GOOD GOVERNANCE**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Solokuro tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2025 yang sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) PERUBAHAN OPD Kecamatan Solokuro.

Bab. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II.HASIL EVALUASI PELAKSANAAN (RENJA) PERUBAHAN OPD TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja (RENJA) Perubahan OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD OPD
- 2.5 Penelaahan Program dan Kegiatan masyarakat

Bab. III. TUJUAN. SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab. IV. RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DAN PENDANAAN

BAB. V. PENUTUP

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra OPD.

OPD Kecamatan Solokuro telah mengevaluasi Kinerja tahun 2024, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024, Kecamatan Solokuro telah mengevaluasi 4 program 12 kegiatan, adapun kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

a. Sub Program : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Sub Program : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran.

a. Sub Program : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

b. Sub Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Sub Program : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan

1. Pengadaan Mebel

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

d. Sub Program : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan

1. Pengadaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

a. Sub Program : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan

1. Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

a. Sub Program : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Kegiatan :

1. Kooordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Sub Program : Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

a. Sub Program : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Sub. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Program : Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Asset Desa
3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum

Pada Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota pada tahun 2024 Telah dialokasikan anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 2.145.861.691,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.704.148.931,- atau 79,42%.. Adapun penggunaan anggaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kecamatan Solokuro pada Tahun 2024 mengalokasikan anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.700.000,- atau 65,67%. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sesuai dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	: Rp.	6.270.000,-
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	: Rp.	6.340.000,-
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp.	7.090.000,-
JUMLAH	: Rp.	19.700.000,-

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kegiatan Administrasi Kuangan Perangkat Daerah, Kecamatan Solokuro pada Tahun 2024 mengalokasikan anggaran Kegiatan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp.1.549.769.691,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.282.393.102,- atau 82,75%. Adapun rincian penggunaan anggaran pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.267.598.102,-
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	
Akhir Tahun SKPD:	Rp. 6.370.000,-
c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	
realisasi Anggaran :	Rp. 8.425.000,-
JUMLAH :	Rp. 1.282.393.102,-

3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kecamatan Solokuro pada Tahun 2024 diadakan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya mengalokasikan anggaran Kegiatan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 27.670.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Adapun rincian penggunaan anggaran pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	: Rp. 0,-
JUMLAH	: Rp. 0,-

4. Kegiatan : Administrasi Umum Pemerintah Daerah

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di kecamatan Solokuro pada Tahun anggran 2024 dilaksanakan melalui Kegiatan Administrasi Umum, dengan mengalokasikan anggaran Kegiatan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 122.250.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 96.072.100,- atau 78,59 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan	
Bangunan Kantor	: Rp. 9.100.000,-
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	: Rp. 22.231.000,-
c. Penyediaan bahan logistik kantor	:Rp. 35.435.200,-
d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	: Rp. 17.915.900,-
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan	
Perundang undangan	: Rp. 1.600.000 ,-
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	
Konsultasi SKPD	: Rp. 9.790.000,-

JUMLAH

: Rp. 96.072.100,-

5. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam Upaya Peningkatan Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Dalam hal ini Kecamatan Solokuro pada Tahun 2024 kegiatan ini mengalokasikan anggaran Kegiatan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp.50.396.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- atau 59,53 %. Adapun rincian penggunaan anggaran pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Mebel : Rp. 30.000.000,-

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya : Rp. 0,-

JUMLAH

: Rp. 30.000.000,-

6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam Upaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kecamatan Solokuro pada Tahun 2024 mengalokasikan anggaran Kegiatan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp.246.042.500 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 229.953.729,- atau 93,46%. Adapun rincian penggunaan anggaran Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya

Air dan Listrik :Rp. 34.849.681,-

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor :Rp. 19.500.000,-

c. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor :Rp. 175.604.048,-

JUMLAH

:Rp. 229.953.729,-

7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah, Kecamatan Solokuro pada Tahun 2024 mengalokasikan anggaran Kegiatan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 119.732.700,- dan terealisasi sebesar Rp.46.030.000,- atau 38,44%. Adapun rincian penggunaan anggaran Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,

Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan
perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan :Rp. 16.530.000,-

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan :Rp. ,-

c. Pemelihraan /Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya :Rp. 29.500.000,-

JUMLAH

: Rp. 46.030.000,-

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Untuk meningkatkan Pelayanan di Kecamatan Solokuro agar cepat tepat dan akurat pada Tahun anggaran 2024 dilaksanakan apa yang disebut dengan istilah yang populer yaitu :PATEN atau Pelayanan terpadu baik kependudukan dan perijinan yang bersekala mikro oleh karena itu melalui Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 45.823.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.135.000,- atau 30,85 %. Adapun rincian penggunaan anggaran Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan

Untuk meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan Solokuro pada Tahun 2024 mengalokasikan anggaran Kegiatan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp.35.823.000 dan terealisasi sebesar Rp. 9.250.000- atau 25,82 %. Adapun rincian penggunaan anggaran Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan : Rp 9.250.000,-

JUMLAH

: Rp. 9.250.000,-

2. Kegiatan : Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Untuk Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum pada Tahun 2024 mengalokasikan anggaran Kegiatan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.885.000,- atau 48,85 %. Adapun rincian penggunaan anggaran Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum : Rp. 4.885.000,-

JUMLAH

: Rp. 4.885.000,-

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Untuk meningkatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Solokuro pada Tahun 2024 mengalokasikan anggaran Pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 41.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.600.000,- atau 6.34%. Adapun rincian penggunaan anggaran Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2024 Kegiatan ini dialokasikan anggaran Kegiatan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 41.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.290.000,- atau 88,51%. Adapun rincian penggunaan anggaran Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	: Rp. 12.550.000,-
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	:Rp. 8.210.000,-
JUMLAH	: Rp. 36.290.000,-

2. Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada tahun 2024 Kegiatan ini dialokasikan anggaran Kegiatan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.530.000,- atau 97,06%. Adapun rincian penggunaan anggaran Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rp. 15.530.000
JUMLAH	: Rp. 15.530.000

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang ada di Kecamatan Solokuro pada Tahun 2024 mengalokasikan anggaran Pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.987.000,- atau 77,47 %. Adapun rincian penggunaan anggaran Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Untuk meningkatkan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, di tingkat Kecamatan Solokuro pada Tahun 2024 mengalokasikan anggaran Kegiatan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.987.000,- atau 77,47 %. Adapun rincian penggunaan anggaran Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	: Rp. 4.680.000,-
b. Fasilitas Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Asset Desa	: Rp. 8.990.000,-
c. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	: Rp. 8.260.000,-
d. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	: Rp. 9.057.000,-
JUMLAH	: Rp.30.987.000,-

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian di bidang Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum, Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, Urusan Organisasi Tatalaksana dan Kehumasan, Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Program dan Pelaporan yaitu :

- a. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah setiap tahun;
- b. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD setiap tahun ;
- c. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun;
- d. Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa setiap bulan ;
- e. Terlaksananya Kegiatan Rapat Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan ;
- f. Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa setiap bulan;
- g. Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- h. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu;
- i. Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- j. Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- k. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- I. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

Terwujudnya kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik cepat dan tepat sesuai SOP yang ada, dengan tetap menjalankan dan melaksanakanNya sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan tetap menjalankan dan melaksanakan :

1. Melaksanakan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
2. Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
5. Terlaksananya Perekaman E-KTP bagi Masyarakat Yang sudah berusia 17 Tahun serta meningkatkan pelayanan di berbagai sektor kemasyarakatan ;
6. Pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui penyaluran bantuan GNOTA kepada para siswa yang tidak mampu dan berprestasi;
7. Terlaksananya Program melalui Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP);

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Inprastruktur, Jembatan dan Jalan Poros Desa, Jalan rabat Beton, Kantor Balai Desa, Saluran Air dan Usaha Simpan - Pinjam yang didukung dengan dana ADD, Bangsun, Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Produktif, yaitu :

1. Melaksanakan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;

3. Melaksanakan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa ;
 4. Melaksanakan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
 5. Terlaksananya pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga, serta mengikuti berbagai lomba dan turnamen baik tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Tingkat Nasional;
 6. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengirimkan Staf untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Diklat Teknis.
 7. Terlaksananya penertiban terhadap para Pedagang kaki lima, Pemberantasan Miras, WTS dan Obat – obatan terlarang , Perusahaan yang belum memiliki Ijin atau masa berlakunya Ijin sudah habis, para penambang liar galian C, Penanggulangan Bencana Alam, Operasi Yustisi dan terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di wilayah Kecamatan Solokuro.
- a. **Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan : NIHIL**
 - b. **Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan : Terlaksana**
 - c. **Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan : Tidak ada**
 - d. **Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan ;**
 - A. **Urusan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**

Faktor penyebab :

 - Tingkat kehadiran peserta dalam mengikuti musrenbang masih kurang, tidak sesuai dengan jumlah undangan;
 - Belum Tercapai dan terlaksanaNya secara optimal Pengadaan maupun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Kecamatan sebagai OPD belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran OPD, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui OPD terkait.

B. Urusan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Faktor Penyebab :

- Pembinaan Kepemudaan masih belum maksimal
- Sarana dan Prasarana dibidang Olah Raga belum tercukupi
- Kurangnya personil di Kecamatan Solokuro
- Masih Banyak Masyarakat yang belum menyadari adanya pentingnya dokumen Kependudukan shinggah banyak diantaranya belum melakuakn perekaman KTP-EI padahal Usianya sudah diatas 17 Tahun.

C. Urusan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Faktor Penyebab :

- Tidak adanya dana Stimulan untuk RT di Desa desa untuk menunjang pembangunan di masing – masing RT
- Masih Belum meratanya Mobil Sehat di tingkat Desa untuk mengantar warga berobat.
- Lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga banyak masyarakat di wilayah Kecamatan Solokuro yang merantau atau menjadi TKI di luar negeri
- Kurangnya penertiban terhadap para Pedagang kaki lima, Pemberantasan Miras, WTS dan Obat – obatan terlarang , Perusahaan yang belum memiliki Ijin atau masa berlakunya Ijin sudah habis, para penambang liar galian C, Penanggulangan Bencana Alam, Operasi Yustisi dan terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di wilayah Kecamatan Solokuro.

**e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD ;
adalah :**

1. Tertatanya administrasi kependudukan dengan baik.
2. Meningkatnya peran serta kepemudaan dibidang olah raga dan seni budaya sehingga pada tahun 2023 dan 2024 mendapatkan beberapa prestasi baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten maupun tingkat Propinsi
3. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, tertibnya para pedagang kaki lima, Para Pengusaha Industri sudah banyak yang memiliki

Ijin Usaha, dan berkurangnya para Penambang liar galian C serta terbebas dari Miras dan Narkoba.

4. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur serta Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Jembatan dan Jalan Poros Desa, Jalan – jalan Dusun, Kantor Desa / Balai Desa dan jalan lingkungan RT.

f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut :

A. Urusan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Kebijakan :

- Mengupayakan tingkat kehadiran peserta dalam mengikuti musrenbang sesuai dengan jumlah undangan serta tepat waktu;
- Mengoptimalkan usulan Pengadaan maupun Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Memberikan kewenangan yang penuh kepada OPD Kecamatan untuk mengelola anggaran operasional dan anggaran dana pembangunan di Kecamatan;
- Menggiatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

B. Urusan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kebijakan :

- Memaksimalkan Pembinaan Kepemudaan di setiap Desa;
- Melengkapi Sarana dan Prasarana dibidang Olah Raga secara bertahap;
- Perlu adanya penambahan tenaga Linmas dan Pembinaan Linmas serta pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang tugas Linmas di Desa;
- Memberikan Sosialisasi dan pemahaman secara massif kepada Masyarakat tentang pentingnya dokumen Kependudukan untuk dimilikinya;
- Perlu adanya peningkatan pembinaan kepemudaan secara rutin

C. Urusan Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelrahan

Kebijakan :

- mengoptimalkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di 10 Desa

D. Urusan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kebijakan :

- Perlu adanya dana Bantuan Stimulan untuk RT di Desa / Kelurahan sehingga program pembangunan di tingkat RT bisa terpenuhi ;
- Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat miskin baik disektor Pendidikan, Kesehatan dan Sosial ekonomi ;
- Diperlukan adanya Lapangan kerja baru melalui sektor Industri, dan Non Industri dengan standart UMK yang memadahi, dengan memberikan bimbingan pelatihan kewirausahaan secara terprogram dan berkelanjutan.

Tabel T.C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kecamatan Solokuro - Kabupaten Lamongan

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian Kinerja Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Kegiatan dan Keluaran s/d Tahun (N-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2021)	
								Targ et	Realis asi	Tingka t Realis asi (%)		Realis asi Capai an	Tingkat Capaia n (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
6	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	% Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	1	1	1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran	1. Jumlah Penyusunan Dokumen	7 Rekening	7 Rekening	7 Reke	7 Reke	100%	7 Rekenin	7 Rekeni	100 %

				n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaa n Perangkat Daerah			ning	ning		g	ng	
					2. Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	100 %
					3. Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100 %

1				2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+ 9)	11 (10/4)
6	1	1	2	Kegiatan : Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 SPJ Gaji/14 SPJ TPP	14 SPJ Gaji/14 SPJ TPP	14 SPJ Gaji/14 SPJ TPP	14 SPJ Gaji/14 SPJ TPP	100 %	14 SPJ Gaji/14 SPJ TPP	14 SPJ Gaji/1 4 SPJ TPP	100%
					2.Jumlah	4	4	4	4	100	4	4	100%

					Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	%	Laporan	Laporan	
					3.Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100 %	14 Laporan	14 Laporan	100%
					4. Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100 %	7 Jenis	7 Jenis	100%
6	1	1	3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%
6	1	1	4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	10 Item	10 Item	10 Item	10 Item	100 %	10 Item	10 Item	100%

					Kantor								
					2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK	3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK	3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK	3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK		3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK	3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK	100%
					3. Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11 Item	11 Item	11 Item	11 Item	100 %	11 Item	11 Item	100%
					4. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100 %	5 Jenis	5 Jenis	100%
					5. Jumlah Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Dus Air Minum/420 Box Snack	80 Dus Air Minum/420 Box Snack	80 Dus Air Minum/420 Box Snack	80 Dus Air Minum/420 Box Snack	100 %	80 Dus Air Minum/420 Box Snack	80 Dus Air Minum/420 Box	100%

												Snack	
6	1	1	5	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Jumlah Pengadaan Mebel	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	100 %	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	100%
6	1	1	6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,s umber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100 %	3 Jenis	3 Jenis	100%
					2.Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Camera/ 1Unit Scan/ 2 Unit Laptop Unit Ac	Camera / 1 Unit Scan/ 2 Unit Laptop Unit Ac	Camera /1Unit Scan/ 2 Unit Laptop Unit Ac	Camera /1Unit Scan/ 2 Unit Laptop Unit Ac	100 %	Camera /1Unit Scan/ 2 Unit Laptop Unit Ac	Cam era/1 Unit Scan / 2 Unit Lapt op Unit Ac	100%
6	1	1	7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1.Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaa n,Biaya Pemeliharaa n dan Pajak	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	100 %	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda	100%

				Daerah	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Moto r/1 Mobil	
					2.Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit Mobil dan 6 Speda Motor	1 Unit Mobil dan 6 Speda Motor	1 Unit Mobil dan 6 Speda Motor	1 Unit Mobil dan 6 Speda Motor	100 %	1 Unit Mobil dan 6 Speda Motor	1 Unit Mobil dan 6 Speda Motor	100%
					3.Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100 %	1 Gedung	1 Gedung	100%

1				2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1	1	2		PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	1	2	1	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %

					Instansi Vertikal Terkait								
1	1	2	2	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerta Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5000 Orang	5000 Orang	5000 Orang	5000 Orang	100%	5000 Orang	5000 Orang	100%
						5000 Orang	7 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	100%

1				2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1	1	3		PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELRAHAN	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	1	3	1	Kegiatan : Koordiansi	Jumlah	3 Jenis	3	3	3	100 %	3 Jenis	3	100%

				Kegiatan Pemeberdayaa n Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kegiata n	Jenis Kegiat an	Jenis Kegiat an	Jenis Kegiat an		Kegiata n	Jenis Kegiat an	
					Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemeberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kcamatan	3 Jenis Kegiata n	3 Jenis Kegiat an	3 Jenis Kegiat an	3 Jenis Kegiat an	100 %	3 Jenis Kegiata n	3 Jenis Kegiat an	100 %
1	1	4		PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang baik	2 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	1	4	1	Kegiatan : Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa	2 Jenis Kegiatan	2 Jenis Kegiat an	2 Jenis Kegiat an	2 Jenis Kegiat an	100 %	3 Jenis Kegiata n	3 Jenis Kegiat an	100 %

					n Aset Desa								
					Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	100 %	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	100 %
					Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Jenis Pembinaan	3 Jenis Pembinaan	3 Jenis Pembinaan	3 Jenis Pembinaan	100 %	3 Jenis Kegiatan	3 Jenis Kegiatan	100 %

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD Kecamatan Solokuro sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan solokuro merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah .

Adapun Kinerja Pelayan OPD Kecamatan Solokuro adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ;
3. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
4. Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T –C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Solokuro.

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) 2023	Tahun (n-1) 2024	Tahun (n) 2025	Tahun n+1) 2023	Tahun (n-2) 2023	Tahun (n-2) 2023	Tahun (n) 2025	Tahun n+1) 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bidang Sekretariat											
1.	Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik..	-	1. Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Rekening	7 Rekening	7 Rekening	7 Rekening	100%	7 Rekening	7 Rekening	7 Rekening	APBD
			2. Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	APBD
			3. Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	APBD
			4. Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 SPJ Gaji/14 SPJ TPP	14 SPJ Gaji/14 SPJ TPP	14 SPJ Gaji/14 SPJ TPP	14 SPJ Gaji/14 SPJ TPP	14 SPJ Gaji/14 SPJ TPP	14 SPJ Gaji/14 SPJ TPP	14 SPJ Gaji/14 SPJ TPP	14 SPJ Gaji/14 SPJ TPP	APBD
			5. Jumlah Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	14 Laporan	APBD
			6. Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	APBD
			7. Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	APBD

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			8. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Item	10 Item	10 Item	10 Item	100%	10 Item	10 Item	100%	APBD
			9. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK	3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK	3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK	3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK	3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK	3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK	3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK	3 unit laptop/10 unit AC/10 unit Printer/11 unit Computer /14 jenis ATK	APBD
			10. Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11 Item	11 Item	11 Item	11 Item	11 Item	11 Item	11 Item	11 Item	APBD
			11. Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	APBD
			12. Jumlah Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Dus Air Minum/420 Box Snack	80 Dus Air Minum/420 Box Snack	80 Dus Air Minum/420 Box Snack	80 Dus Air Minum/420 Box Snack	80 Dus Air Minum/420 Box Snack	80 Dus Air Minum/420 Box Snack	80 Dus Air Minum/420 Box Snack	80 Dus Air Minum/420 Box Snack	APBD
2.	Prosentase pengadaaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik .		1. Jumlah Pengadaan Mebel	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	1 Set Kursi Tamu/2 Buah Meja Kerja	APBD

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	0	APBD
		2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Camera/1Unit Scan/ 2 Unit Laptop Unit Ac	Camera/ 1 Unit Scan/ 2 Unit Laptop Unit Ac	Camera/1Unit Scan/ 2 Unit Laptop Unit Ac	Camera/1Unit Scan/ 2 Unit Laptop Unit Ac	Camera/1Unit Scan/ 2 Unit Laptop Unit Ac	Camera/1Unit Scan/ 2 Unit Laptop Unit Ac	Camera/1Unit Scan/ 2 Unit Laptop Unit Ac	0	APBD
		3. Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	0	APBD
		4. Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	6 Unit Speda Motor/1 Mobil	0	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5. Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	0	APBD
			7. Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Pagar Kantor Kecamatan dan Kelurahan Solokuro	0	1 Unit	0	0	1 Unit	0	0		APBD
			8. Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Tempat Parkir Kantor Kecamatan Solokuro	1 Unit	0	0		1 Unit	0	0		APBD
			9. Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	1 Unit Mobil	1 Unit Mobil 6 Motor	1 Unit Mobil 6 Motor	1 Unit Mobil 6 Motor	1 Unit Mobil 6 Motor	1 Unit Mobil 6 Motor	1 Unit Mobil 6 Motor	1 Unit Mobil 6 U	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Prosentase aparaturn yang disiplin.	-	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang disediakan	0	0	20 Stel	20 Stel	0	0	20 Stel	20 Stel	APBD
4.	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang	-	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	4 Orang				0 Orang	Orang	Orang	APBD
5.	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan tepat waktu	-	Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi yang tersusun	25 Laporan	22 Laporan			25 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	APBD
			Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun	7 Laporan				7 Laporan				APBD
			Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	8 Laporan				8 Laporan				APBD
			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1. Prosentase Capaian Layanan Publik.	-	1. Jumlah capaian layanan publik yang dilaksanakan	- 7.500	- 7.750	- 8.000	- 8.250	- 7.350	- 7.450	- 8.000	- 8.250	APBD

	2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.		2. Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan	79,60 % (B)	80,25% (B)	80,30 % (B)	81,20 % (B)	79,60%(B)	80,25 % (B)	80,30% (B)	81,20 % (B)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bidang Ekonomi dan Pembangunan											
	Prosentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	APBD
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
	Prosentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	APBD
		-	Jumlah Desa yang mendapat fasilitas kemiskinan	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bidang Keamanan dan Ketertban Umum											
	Prosentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	-	Jumlah Pembinaan Politik dan Linmas yang dilaksanakan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaa n	3 Kali Pembinaa n	3 Kali Pembinaa n	3 Kali Pembinaa n	3 Kali Pembinaa n	3 Kali Pembinaa n	APBD
	Bidang Pemerintahan											
	Prosentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan	-	Jumlah Desa yang menerapkan Anggaran berbasis kinerja	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	APBD
			Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	APBD

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Solokuro.

- a. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan OPD Kecamatan Solokuro sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Solokuro masih terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebagai berikut :
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Solokuro antara lain :
 1. Kecamatan Solokuro kategori Type A maksimal jumlah personil sebanyak 16 Orang Terdiri dari 8 Orang PNS ditambah 8 orang tenaga kontrak sebagai Tenaga Administrasi 3 Orang , 2 Orang personil Tenaga kontrak Keamanan, dan 2 orang tenaga kontrak Kebersihan Kantor, 1 Tenaga Kontrak Bupati sehingga masih kurang, dalam melaksanakan tugas masih banyak personil yang merangkap pekerjaan lain,
 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam tugas - tugas pelayanan belum maksimal disebabkan :
 - Kurangnya Tenaga Administrasi dan terbatasnya personil yang mampu mengoperasikan computer pada Kantor Kecamatan Solokuro
 3. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Solokuro hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.

Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Solokuro sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Solokuro terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
 4. Di Kecamatan Solokuro masih terdapat Desa yang belum ada Sekretaris Desanya antara lain : Desa Dadapan, Tenggulun, Payaman, Solokuro, Bluri, Banyubang dan Desa Takerharjo sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal, untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan desa diperlukan adanya pengisian jabatan Sekretaris Desa ;
 5. Kualitas pendidikan di wilayah Kecamatan Solokuro masih belum merata, terutama disebabkan penempatan tenaga pendidik / guru yang tidak merata, kurangnya tenaga administrasi di lembaga sekolah dan kurangnya sarana

prasarana pendidikan, Dalam pembangunan di bidang pendidikan masih kurangnya Beasiswa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin / tidak mampu dan kurangnya mutu pendidikan yang dipengaruhi oleh kualitas SDM dari tenaga pendidik (guru), sehingga prioritas pemerintah Kecamatan Solokuro untuk mengurangi masalah ini dengan meningkatkan kualitas mutu tenaga pendidik dalam hal ini salah satu wujud dengan menyelenggarakan diklat – diklat dan penyetaraan kualifikasi guru menjadi minimal ber ijazah S1

- c. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Solokuro terhadap Capaian program Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang Pemerintahan . Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan Umum dan Ketertiban Masyarakat

a. Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

1. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa se Kecamatan Solokuro setiap bulan.
2. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Kepala Desa dan Perangkat Desa , se Kecamatan Solokuro setiap bulan .
3. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa se Kecamatan Solokuro setiap bulan

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat.

1. Melakukan Monitoring pendistribusian Raskin
2. Pelayanan Pendistribusian Dana BLT, PKH dan Penyaluran bantuan Pendidikan GNOTA kepada para Siswa – Siswi tidak mampu yang berprestasi
3. Mengkoordinir penjaringan data Jamkesda dan Jamkesmas
4. Pelayanan Surat Permohonan Bantuan Sarana Sosial.
5. Pelayanan Surat Pernyataan Miskin

c. Meningkatnya Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan.

1. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur, Jembatan dan Jalan Poros Desa, Pembangunan RT, Balai Desa

2. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan serta pelaporan

d. Meningkatnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat

Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima

e. Meningkatnya pelayanan Tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan.

1. Terwujudnya tertib administrasi berupa capaian indikator jumlah surat masuk dan keluar jumlah barang inventaris dan laporan kepegawaian setiap Bulan, Triwulan dan Semester serta Penyelenggaraan dan penyerataan sistem kelembagaan
2. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, Rapat Staf setiap bulan, melaksanakan SKJ setiap hari Jum'at dan Apel pagi / sore setiap hari kerja serta Penyempurnaan struktur jabatan dan analisa beban kerja
3. Mengikutsertakan Diklat PIM bagi Staf yang menduduki jabatan serta Pengembangan pengawasan SJPD berbasis kinerja

f. Meningkatnya Pengendalian keamanan dan ketentraman masyarakat di wilayah Kecamatan Solokuro.

1. Sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah kepada masyarakat ;
2. Terwujudnya penaggulanagan dan penaganan Bencana Alam di wilayah Kecamatan Solokuro.
3. Tewujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4. Terwujudnya Pengendalian dan Penertiban PK5, Industri Kecil dan Penambang liar.
5. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan dan penertiban terhadap para pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran udara (Bahu), penertiban terhadap pedagang kaki lima, warung – warung , pemberantasan miras dan penambang liar galian C .

- d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD Kecamatan Solokuro ;

- c. Formulasi Isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 3. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat
 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 6. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 8. Program – program lain yang tidak masuk DPA akan diajukan melalui PAK

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Solokuro.

1. Proses Awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan reel masyarakat (prosedur Bottem Up).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya .

Tabel T-C.31

**Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Solokuro**

NAMA PD : KECAMATAN SOLOKURO

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.OOO)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.OOO)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec,Solokuro	% Unit Kerja internal yang Terlayani dengan baik	100%	1.900.535.056	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec,Solokuro	% Unit Kerja internal yang Terlayani dengan baik	100%	1.900.535.056	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec,Solokuro	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Selaras	100%	16.331.000,00	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec,Solokuro	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Selaras	100%	16.331.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec,Solokuro	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang terselesaikan	1 dokumen laporan Renja / Renstra	5.297.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec,Solokuro	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang terselesaikan	1 dokumen laporan Renja / Renstra	5.297.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec,Solokuro	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Kali	5.451.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec,Solokuro	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Kali	5.451.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec,Solokuro	Jumlah dokumen Evaluasi yang terselesaikan	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	5.582.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec,Solokuro	Jumlah dokumen Evaluasi yang terselesaikan	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	5.582.000	
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec,Solokuro	Presentase Aparatur yang Disiplin	100%	1.539.047.376,00	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec,Solokuro	Presentase Aparatur yang Disiplin	100%	1.539.047.376,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kec,Solokuro	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 SPJ Gaji	1.529.989.376,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kec,Solokuro	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 SPJ Gaji	1.529.989.376,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec,Solokuro	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.776.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec,Solokuro	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.776.000,00	
	Penyusunan,Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec,Solokuro	Jumlah Penyusunan,Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14 Laporan	4.282.000,00	Penyusunan,Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec,Solokuro	Jumlah Penyusunan,Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14 Laporan	4.282.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec,Solokuro	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22 stel	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec,Solokuro	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22 stel	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec,Solokuro	Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	63.967.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec,Solokuro	Prosentase Unit Kerja Internal yang	100%	63.967.300	

								Terlayani dengan Baik			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec,Solokuro	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Item	9.307.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec,Solokuro	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Item	9.307.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec,Solokuro	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpenuhi	20 item	5.408.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec,Solokuro	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpenuhi	20 item	5.408.700	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec,Solokuro	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	50 item	14.363.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	50 item	14.363.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	15 Item	13.960.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	15 Item	13.960.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	8 Jenis	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	8 Jenis	2.700.000	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	800 Kotak Nasi 50 dus air	18.228.300	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	800 Kotak Nasi 50 dus air	18.228.300	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	19.793.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	19.793.000	
	Pengadaan Mebel	Kec,Solokuro	Jumlah Pengadaan Mebel yang tercukupi	100 buah Kursi Lipat	19.793.000	Pengadaan Mebel	Kec,Solokuro	Jumlah Pengadaan Mebel yang tercukupi	100 buah Kursi Lipat	19.793.000	
	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Kec,Solokuro	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya yang tercukupi	2 Unit Computer Al in one, 2 unit printer , 1 set Sound system, 4 kipas blower, 2 unit Layar Proyektor dan 1 Unit TV	-	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Kec,Solokuro	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya yang tercukupi	2 Unit Computer Al in one, 2 unit printer , 1 set Sound system, 4 kipas blower, 2 unit Layar Proyektor dan 1 Unit TV	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec,Solokuro	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	193.168.980	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec,Solokuro	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	193.168.980	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	Kec,Solokuro	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 Rekening	43.952.980	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	5 Item	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 Rekening	43.952.980	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec,Solokuro	Jumlah Jasa Service Peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit laptop, 10 unit AC, 10 Unit printer,	19.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec,Solokuro	Jumlah Jasa Service Peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit laptop, 10 unit AC, 10 Unit printer,	19.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec,Solokuro	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 orang	130.216.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec,Solokuro	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 orang	130.216.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec,Solokuro	Prosentase Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	68.227.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec,Solokuro	Prosentase Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	68.227.400	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec, Solokuro	Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Mobil 6 Unit Motor	40.427.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec, Solokuro	Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Mobil 6 Unit Motor	40.427.400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec, Solokuro	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil 6 Unit Motor	6.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec, Solokuro	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Mobil 6 Unit Motor	6.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec, Solokuro	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan 2 Unit Gedung Kantor, Pavingisasi dan Pembangunan Gedung ARSIP	21.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec, Solokuro	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan 2 Unit Gedung Kantor, Pavingisasi dan Pembangunan Gedung ARSIP	21.800.000	
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec, Solokuro	% Unit Kerja internal yang Terlayani dengan baik	100%	20.201.700	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec, Solokuro	% Unit Kerja internal yang Terlayani dengan baik	100%	20.201.700	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec, Solokuro	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	6.217.500	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec, Solokuro	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	6.217.500	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec, Solokuro	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Kegiatan	6.217.500	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec, Solokuro	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Kegiatan	6.217.500	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec, Solokuro	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	13.984.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec, Solokuro	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	13.984.200	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec, Solokuro	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.984.200	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec, Solokuro	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.984.200	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec, Solokuro	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	26.407.300	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec, Solokuro	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	26.407.300	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kec, Solokuro	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	14.207.300	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa		Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	14.207.300	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kec,Solokuro	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2 Kali	8.026.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kec,Solokuro	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2 Kali	8.026.300	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat di Wilayah Kcamatan	Kec,Solokuro	Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat di Wilayah Kcamatan	3 Kegiatan	6.181.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat di Wilayah Kcamatan	Kec,Solokuro	Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat di Wilayah Kcamatan	3 Kegiatan	6.181.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kleurahan	Kec,Solokuro	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	12.200.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kleurahan		Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	12.200.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec,Solokuro	Jumlah Pembinaan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan	2 Kegiatan	12.200.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Pembinaan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan	2 Kegiatan	12.200.000	
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec,Solokuro	Prosentasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	24.918.000	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec,Solokuro	Prosentasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	24.918.000	
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec,Solokuro	Prosentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	24.918.000	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Prosentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	24.918.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec,Solokuro	Jumlah Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa	10 Desa	6.181.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec,Solokuro	Jumlah Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa	10 Desa	6.181.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec,Solokuro	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Desa	6.181.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec,Solokuro	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Desa	6.181.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec,Solokuro	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Kali	6.181.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec,Solokuro	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Kali	6.181.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec,Solokuro	Jumlah pembinaan Pengendalian keamanan yang dilaksanakan	3 Kali	6.375.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec,Solokuro	Jumlah Desa yang difasilitasi	3 Kali	6.375.000	
	Jumlah				1.972.062.056					1.972.062.056	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawali usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Tabel 2.4 (terlampir)

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kantor Kecamatan Solokuro

No.	USULAN	MASALAH	OPD TUJUAN	VOLUME	ANGGARAN	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Pembangunan Saluran air/Draenase di Jalan Poros Kabupaten Desa Dadapan-Solokuro	Belum adanya saluran air/draenase sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	500 meter	800.000.000	Solokuro	Dadapan
02	Perbaikan Jalan Poros Kabupaten Desa Dadapan-Solokuro	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	22500 meter	6.000.000.000	Solokuro	Dadapan
03	Pembangunan Jalan Poros Desa Dadapan-Sugihan	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4500 meter	300.000.000	Solokuro	Dadapan
04	Pembangunan Jalan Poros Dusun Simanraya Desa Dadapan-Sugihan	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	900 meter	450.000.000	Solokuro	Dadapan
05	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Banyaknya jalan yang belum terjangkau PJU menyebabkan kurang maksimalnya perekonomian masyarakat desa	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	25 Titik	450.000.000	Solokuro	Dadapan
06	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Dadapan	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	900 meter	850.000.000	Solokuro	Dadapan
07	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Langgarejo	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	400 meter	350.000.000	Solokuro	Dadapan
08	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Simanraya	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	400 meter	350.000.000	Solokuro	Dadapan
09	Pembangunan Saluran air/Draenase di dalam lingkungan permukiman Dusun Simanraya-Dusun Langgarejo	Belum adanya saluran air/draenase sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	500 meter	450.000.000	Solokuro	Dadapan

10	Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat	Keberadaan Pasar sangat bermanfaat bagi masyarakat perlu adanya renovasi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1 Paket	550.000.000	Solokuro	Dadapan
11	Pembangunan TPS3R	karena belum adanya TPS3R sehingga sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos	Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	600.000.000	Solokuro	Dadapan
12	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Banyaknya jalan yang belum terjangkau PJU menyebabkan kurang maksimalnya perekonomian masyarakat desa	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	25 Titik	450.000.000	Solokuro	Dadapan
13	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Langgarejo	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	400 meter	350.000.000	Solokuro	Dadapan
14	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Simanraya	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	400 meter	350.000.000	Solokuro	Dadapan
15	Pembangunan Saluran air/Draenase di dalam lingkungan permukiman Dusun Simanraya	Belum adanya saluran air/draenase sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	400 meter	350.000.000	Solokuro	Dadapan
16	Pembangunan Jalan Poros Desa Tebluru-Sugihan	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	3000 meter	2.500.000.000	Solokuro	Tebluru
17	Pembangunan Jalan Poros Strategis Desa Tebluru-Laren	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	11400 meter	4.500.000.000	Solokuro	Tebluru
18	Pembangunan Jalan Pertanian Semendek,mberan,koroulong	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	1500 meter	800.000.000	Solokuro	Tebluru
19	Pembangunan Jalan Poros Desa Tebluru-Tamanprijek	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2400 meter	1.500.000.000	Solokuro	Tebluru

20	Bumi perkemahan	Belum ada Tempat edukasi dan perkemahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	1 Paket	1.500.000.000	Solokuro	Tebluru
21	Penambahan ruang perkantoran	Kekurangan ruang perkantoran sehingga mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3 Unit	700.000.000	Solokuro	Tebluru
22	Pengerukan Waduk/Embung Jangkang, Kuwati Desa Tebluru	Guna meningkatkan hasil pertanian perlu dibangun waduk/embung sehingga dapat digunakan sebagai pengairan bagi persawahan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	2 Paket	750.000.000	Solokuro	Tebluru
23	Normalisasi Jalan di Lingkungan Permukiman	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	4000 meter	1.905.000.000	Solokuro	Tebluru
24	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Banyaknya jalan yang belum terjangkau PJU menyebabkan kurang maksimalnya perekonomian masyarakat desa	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	50 Titik	1.105.000.000	Solokuro	Tebluru
25	Saluran Permukiman (TPT/Saluran air di dalam lingkungan permukiman)	Belum adanya saluran air/draenase sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	500 meter	800.000.000	Solokuro	Tebluru
26	Pembangunan Gorong- gorong di dalam lingkungan permukiman Semendek,mberan,koroulong	Belum adanya gorong-gorong sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	3 Titik	300.000.000	Solokuro	Tebluru
27	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	564 meter	430.000.000	Solokuro	Tebluru
28	Renovasi Balai desa Tebluru	Perlu adanya perbaikan dan masih butuh perkantoran lembaga2 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1 Unit	700.000.000	Solokuro	Tebluru
29	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Banyaknya jalan yang belum terjangkau PJU menyebabkan kurang maksimalnya perekonomian masyarakat desa	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	25 Titik	450.000.000	Solokuro	Tebluru

30	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman RT.06/02	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	564 meter	430.000.000	Solokuro	Tebluru
31	Saluran Permukiman (TPT/Saluran air di dalam lingkungan permukiman) Sumberan	Belum adanya saluran air/draenase sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	500 meter	800.000.000	Solokuro	Tebluru
32	Revitalisasi/Pembangunan Balai Desa Sugihan	Guna Menunjang Pelayanan kepada masyarakat perlu untuk merenovasi Balai Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1 Paket	250.000.000	Solokuro	Sugihan
33	Pembangunan Jalan Poros Strategis Desa Sugihan-Sumuran	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	300 meter	230.000.000	Solokuro	Sugihan
34	Pembangunan Jalan Poros Desa Sugihan-Tebluru	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	300 meter	230.000.000	Solokuro	Sugihan
35	Pembangunan Jalan Poros Desa Sugihan-Sendangagung	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	300 meter	230.000.000	Solokuro	Sugihan
36	Pembangunan Jalan Poros Desa Sugihan-Dadapan	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	300 meter	230.000.000	Solokuro	Sugihan
37	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman RT. 12 (Depan Dluha)	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	500 meter	405.000.000	Solokuro	Sugihan
38	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman RT. 7 (Depan SDN)	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	300 meter	250.000.000	Solokuro	Sugihan
39	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman RT. 5 (Depan Slamet ke Utara)	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	500 meter	405.000.000	Solokuro	Sugihan

40	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Banyaknya jalan yang belum terjangkau PJU menyebabkan kurang maksimalnya perekonomian masyarakat desa	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	25 Titik	450.000.000	Solokuro	Sugihan
41	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Sugihan	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	450 meter	400.000.000	Solokuro	Sugihan
42	Pembangunan Jalan Poros Desa Tenggulun-Tamanprijek	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2000 meter	2.500.000.000	Solokuro	Tenggulun
43	Pembangunan Jalan Poros Desa Tenggulun-Payaman	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	900 meter	930.000.000	Solokuro	Tenggulun
44	Pembangunan Jalan Usaha Tani Klapen	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	1500 meter	950.000.000	Solokuro	Tenggulun
45	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Banyaknya jalan yang belum terjangkau PJU menyebabkan kurang maksimalnya perekonomian masyarakat desa	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	25 Titik	450.000.000	Solokuro	Tenggulun
46	Pembanguna Saluran Air Drainase/Irigasi	Belum adanya saluran air/draenase sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	3 Titik	1.500.000.000	Solokuro	Tenggulun
47	Saluran Permukiman (TPT/Saluran air di dalam lingkungan permukiman)	Belum adanya saluran air/draenase sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	750 meter	520.000.000	Solokuro	Tenggulun
48	Pembangunan Gorong- gorong di dalam lingkungan permukiman	Belum adanya gorong-gorong sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3 Titik	1.700.000.000	Solokuro	Tenggulun
49	Perbaikan Jalan Poros Kabupaten Desa Tenggulun-Solokuro	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	1000 meter	950.000.000	Solokuro	Tenggulun

50	Perbaikan Jembatan Jalan Poros Kabupaten Desa Tenggulun-Solokuro	Karena kerusakan jembatan sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	1000 meter	950.000.000	Solokuro	Tenggulun
51	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	564 meter	430.000.000	Solokuro	Tenggulun
52	Normalisasi Jalan Poros Desa Payaman-Solokuro	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	1000 meter	850.000.000	Solokuro	Payaman
53	Perbaikan Jalan Poros Strategis Kabupaten Desa Payaman-Kranji	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	1350 meter	1.566.000.000	Solokuro	Payaman
54	Normalisasi Jalan Poros Desa Payaman-Bango	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1350 meter	500.000.000	Solokuro	Payaman
55	Pembangunan Saluran air/Draenase di dalam lingkungan permukiman Dusun Sawo	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	500 meter	1.000.000.000	Solokuro	Payaman
56	Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat	Keberadaan Pasar sangat bermanfaat bagi masyarakat perlu adanya renovasi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	100 Unit	1.000.000.000	Solokuro	Payaman
57	Pembangunan Saluran air/Draenase di dalam lingkungan permukiman Dusun Sejajar	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	500 meter	250.000.000	Solokuro	Payaman
58	Pembangunan Jalan Poros Desa Payaman-Tenggulun	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	750 meter	460.000.000	Solokuro	Payaman
59	Pembangunan Jalan masuk Dusun Sejajar-Sododadi	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	1200 meter	950.000.000	Solokuro	Payaman
60	Pembangunan Saluran air/Draenase di Jalan Poros Kabupaten Desa Payaman-Paciran	Belum adanya saluran air/draenase sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	1500 meter	1.100.000.000	Solokuro	Payaman

61	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Banyaknya jalan yang belum terjangkau PJU menyebabkan kurang maksimalnya perekonomian masyarakat desa	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	50 Titik	900.000.000	Solokuro	Payaman
62	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Sawo	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	350 meter	150.000.000	Solokuro	Payaman
63	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Ringin	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	350 meter	150.000.000	Solokuro	Payaman
64	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Palirangan	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	350 meter	150.000.000	Solokuro	Payaman
65	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Gayam	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	350 meter	150.000.000	Solokuro	Payaman
66	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Asem	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	350 meter	150.000.000	Solokuro	Payaman
67	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Asem	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	350 meter	150.000.000	Solokuro	Payaman
68	Pembangunan Saluran air/Draenase di dalam lingkungan permukiman Dusun Sejarar	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	500 meter	50.000.000	Solokuro	Payaman
69	Pembangunan Gapura Pintu Masuk Desa	Belum adanya gapura sebagai penanda/informasi masuk Desa Solokuro	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1 Unit	250.000.000	Solokuro	Solokuro
70	Pembangunan Jalan Poros Desa Solokuro-Bulubrangsi	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1000 meter	500.000.000	Solokuro	Solokuro

71	Pembangunan Jalan Poros Strategis Desa Solokuro-Dagan	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	3000 meter	2.500.000.000	Solokuro	Solokuro
72	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	564 meter	530.000.000	Solokuro	Solokuro
73	Pembangunan Saluran air/Draenase di dalam lingkungan permukiman Desa Solokuro	Belum adanya saluran air/draenase sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	400 meter	500.000.000	Solokuro	Solokuro
74	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Banyaknya jalan yang belum terjangkau PJU menyebabkan kurang maksimalnya perekonomian masyarakat desa	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	25 Titik	450.000.000	Solokuro	Solokuro
75	Saluran Permukiman (TPT/Saluran air di dalam lingkungan permukiman)	Belum adanya saluran air/draenase sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	750 meter	520.000.000	Solokuro	Solokuro
76	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Takerharjo	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	564 meter	530.000.000	Solokuro	Takerharjo
77	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Petiyen	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	800 meter	695.000.000	Solokuro	Takerharjo
78	Pembangunan Jalan Poros Desa Takerharjo-Lowayu	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1000 meter	500.000.000	Solokuro	Takerharjo
79	Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat Dusun Petiyen	Keberadaan Pasar sangat bermanfaat bagi masyarakat perlu adanya renovasi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5 Unit	500.000.000	Solokuro	Takerharjo
80	Revitalisasi/Pembangunan Pasar Hewan Petiyen	Keberadaan Pasar sangat bermanfaat bagi masyarakat perlu adanya renovasi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1 Paket	1.000.000.000	Solokuro	Takerharjo

81	Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat Sido Rejo	Keberadaan Pasar sangat bermanfaat bagi masyarakat perlu adanya renovasi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1 Paket	500.000.000	Solokuro	Takerharjo
82	Rehabilitasi Balai Desa Takerharjo	Kekurangan ruang perkantoran sehingga mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1 Paket	500.000.000	Solokuro	Takerharjo
83	Rehabilitasi Balai Dusun Petiyen	Kekurangan ruang perkantoran sehingga mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1 Paket	500.000.000	Solokuro	Takerharjo
84	Pembanguna Saluran Air Drainase/gorong-gorong	Belum adanya saluran air/draenase sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	400 meter	420.000.000	Solokuro	Takerharjo
85	Pembangunan TPT Jalan Poros Desa Takerharjo-Lowayu	Belum adanya Tembok Penahan Tanah (TPT) sehingga banyak air yang tergenang di jalan dan tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	250 meter	240.000.000	Solokuro	Takerharjo
86	Saluran Permukiman (TPT/Saluran air di dalam lingkungan permukiman) Desa Takerharjo	Belum adanya saluran air/draenase sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	350 meter	420.000.000	Solokuro	Takerharjo
87	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Banyaknya jalan yang belum terjangkau PJU menyebabkan kurang maksimalnya perekonomian masyarakat desa	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	25 Titik	450.000.000	Solokuro	Takerharjo
88	Pembangunan Gapura Pintu Masuk Dusun	Belum adanya gapura sebagai penanda/informasi masuk Desa Solokuro	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1 Unit	250.000.000	Solokuro	Solokuro
89	Pembangunan Taman Balai Dusun Petiyen	Belum Adanya Taman Dan Ikon Dusun Petiyen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1000 meter	500.000.000	Solokuro	Solokuro
90	Pembangunan TPS3R	karena belum adanya TPS3R sehingga sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efesien belum terlaksana	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	3 Paket	900.000.000	Solokuro	Dagan

91	Pembangunan Gorong - gorong Jalan Kabupaten (Box Culvert)	Belum adanya gorong-gorong sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan	2000 meter	950.000.000	Solokuro	Dagan
92	Pembangunan Prasarana Pertanian (Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani)	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	4 Titik	200.000.000	Solokuro	Dagan
93	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	264 meter	250.000.000	Solokuro	Dagan
94	Pembangunan Jalan Poros Desa Dagan-Kemantren	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2500 meter	1.500.000.000	Solokuro	Dagan
95	Pembangunan Jalan Poros Desa Dagan-Banjarwati	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3000 meter	2.000.000.000	Solokuro	Dagan
96	Pembangunan Jalan Poros Desa Dagan-Solokuro	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4500 meter	3.000.000.000	Solokuro	Dagan
97	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Banyaknya jalan yang belum terjangkau PJU menyebabkan kurang maksimalnya perekonomian masyarakat desa	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	25 Titik	450.000.000	Solokuro	Dagan
98	Saluran Permukiman (TPT/Saluran air di dalam lingkungan permukiman)	Belum adanya saluran air/draenase sehingga mengakibatkan genangan air meluber ke jalan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	500 meter	350.000.000	Solokuro	Dagan
99	Rehabilitasi Balai Desa Banyubang	Kekurangan ruang perkantoran sehingga mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15x10 m	500.000.000	Solokuro	Banyubang
100	Perluasan Pasar Rakyat Desa Banyubang	Keberadaan Pasar sangat bermanfaat bagi masyarakat perlu adanya renovasi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	40x40	350.000.000	Solokuro	Banyubang

101	Pembangunan Jalan Poros Desa Banyubang-Bejan	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1000 meter	700.000.000	Solokuro	Banyubang
102	Pembangunan Jalan Poros Desa Banyubang-Solokuro	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	450 meter	305.000.000	Solokuro	Banyubang
103	Pembangunan Prasarana Pertanian (Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani)	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	100 meter	125.000.000	Solokuro	Banyubang
104	Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat Desa Banyubang	Keberadaan Pasar sangat bermanfaat bagi masyarakat perlu adanya renovasi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	20x5	300.000.000	Solokuro	Banyubang
105	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Banyaknya jalan yang belum terjangkau PJU menyebabkan kurang maksimalnya perekonomian masyarakat desa	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	25 Titik	450.000.000	Solokuro	Banyubang
106	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun Banyubang	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	300 meter	275.000.000	Solokuro	Banyubang
107	Reahap Gapura Pintu Masuk Desa	Belum adanya gapura sebagai penanda/informasi masuk Desa Bluri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1 Unit	300.000.000	Solokuro	Bluri
108	Pembangunan Jalan Poros Desa Bluri-Tlogosadang	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1000 meter	3.500.000.000	Solokuro	Bluri
109	Pelebaran Jalan Poros Desa Bluri-Tlogosadang	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maximal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	500 meter	250.000.000	Solokuro	Bluri
110	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Banyaknya jalan yang belum terjangkau PJU menyebabkan kurang maksimalnya perekonomian masyarakat desa	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	15 Titik	200.000.000	Solokuro	Bluri

111	Gedung serba guna	Belum ada gedung untuk kegiatan rapat dll	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1 Unit	250.000.000	Solokuro	Bluri
112	Pembangunan Jalan Poros Desa Bluri-Dagan	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maksimal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	450 meter	350.000.000	Solokuro	Bluri
113	Pembangunan TPS3R	karena belum adanya TPS3R sehingga sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan	3 Paket	900.000.000	Solokuro	Bluri
114	Pembanguna Situs Makam Seseput	Perlu adanya Pembangunan Bangunan permanen di makam seseput	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1 Unit	150.000.000	Solokuro	Bluri
115	Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat	Keberadaan Pasar sangat bermanfaat bagi masyarakat perlu adanya renovasi	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1 Paket	350.000.000	Solokuro	Bluri
116	Pembangunan Jalan di Lingkungan Permukiman Dusun	Karena banyaknya Jalan yang berlubang dan rusak sehingga tidak bisa di manfaatkan oleh Masyarakat secara maksimal	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	264 meter	250.000.000	Solokuro	Bluri
		JUMLAH			86.666.000.000		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Solokuro antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2020 oleh Kecamatan Solokuro adalah :

1. Program Nasional : Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
Program OPD : Fasilitas Kemiskinan
2. Program Nasional : Konektifitas dan Pemerataan
Program OPD : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
3. Program Nasional : Nilai Tambah ekonomi dan kesempatan Kerja
Program OPD : Fasilitas Pengembangan Potensi ekonomi
4. Program Nasional : Ketahanan Pangan,air,energi dan Lingkungan
Program OPD : Penyediaan Jasa Perkantoran
5. Program Nasional : Stabilitas pertahanan dan keamanan
Program OPD : Pengendalian Keamanan lingkungan

III. 2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD Kecamatan Solokuro.

Adapun tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Solokuro tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan** : Perencanaan Pembangunan Daerah.
Sasaran : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2. **Tujuan** : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Sasaran : Pembinaan Organisasi Kepemudaan
3. **Tujuan** : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Sasaran : Pengendaalian Keamanan Lingkungan
4. **Tujuan** : **a.** Pelayanan Administrasi Perkantoran .
b. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.

- c. Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- Sasaran** : a. – Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
-Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
-Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
-Penyediaan jasa kebersihan kantor
-Penyediaan Alat Tulis Kantor
-Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
-Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-Penyediaan Meubelair
-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
-Penyediaan makanan dan minuman
-Penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan
- b. - Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Pendopo Kecamatan
- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
- c. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD
- Penyusunan laporan Keuangan semesteran
- Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun.

5. **Tujuan** : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Sasaran : Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih efektif

Dari uraian tersebut diatas, Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Solokuro Tahun 2020 ini dijadikan sebagai Pedoman Kegiatan OPD Kecamatan Solokuro dalam menentukan arah yang dicapai pada Tahun 2020, dan sebagai bahan evaluasi kerja untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dijabarkan melalui Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

III. 3. Program dan Kegiatan.

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 1. Program dan Kegiatan rutin setiap tahun
 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
 3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se Kecamatan Solokuro
- b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

a. Sub Program : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Sub Program : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran.

g. Sub Program : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

h. Sub Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Sub Program : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

f. Sub Program : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan

1. Pengadaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

g. Sub Program : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan

1. Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

a. Sub Program : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

Kegiatan :

1. Kooordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait

b. Sub Program : Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

a. Sub Program : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Program : Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Asset Desa
3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum

BAB IV

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan Ranwal RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan sesuai dengan Ranwal RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029, yaitu **“Terwujud Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”** ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (Lima) yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif”**.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistic, integrative, dan spasial yang dilakuakn dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD)

Tabel T-C.33
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lamongan

Kecamatan Solokuro

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	Kec.Solokuro	100%	1.900.535.056	Dana Aokasi Umum		100%	2.110.588.562
7	01.01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Selaras	Kec.Solokuro	100%	16.331.000	Dana Aokasi Umum		100%	17.964.100
7	01.01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang terselesaikan	Kec.Solokuro	1 dokumen laporan Renja / Renstra	5.297.500	Dana Aokasi Umum		1 dokumen laporan Renja / Renstra	5.827.250
7	01.01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Solokuro	3 Kali	5.451.500	Dana Aokasi Umum		3 Kali	5.996.650

7	01.01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi yang terselesaikan	Kec.Solokuro	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	5.582.000	Dana Aokasi Umum		1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	6.140.200
7	01.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	Kec.Solokuro	100%	1.539.047.376	Dana Aokasi Umum		100%	1.692.952.114
7	01.01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	Kec.Solokuro	14 SPJ Gaji	1.529.989.376	Dana Aokasi Umum		14 SPJ Gaji	1.682.988.314
7	01.01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun	Kec.Solokuro	2 Laporan	4.776.000	Dana Aokasi Umum		2 Laporan	5.253.600
7	01.01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang terselesaikan tepat waktu	Kec.Solokuro	14 Laporan	4.282.000	Dana Aokasi Umum		14 Laporan	4.710.200
7	01.01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang di siplin	Kec.Solokuro	100%	-	Dana Aokasi Umum		100%	20.000.000
7	01.01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kec.Solokuro	20 Stel	-	Dana Aokasi Umum		20 Stel	20.000.000
7	01.01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Perangkat Daerah	Kec.Solokuro	100%	63.967.300	Dana Aokasi Umum		100%	70.364.030
7	01.01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Solokuro	10 Item	9.307.300	Dana Aokasi Umum		10 Item	10.238.030
7	01.01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpenuhi	Kec.Solokuro	20 item	5.408.700	Dana Aokasi Umum		20 item	5.949.570
7	01.01	2.06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Kec.Solokuro	50 item	14.363.000	Dana Aokasi Umum		50 item	15.799.300

7	01.01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	Kec.Solokuro	15 Item	13.960.000	Dana Aokasi Umum		15 Item	15.356.000
7	01.01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kec.Solokuro	8 Jenis	2.700.000	Dana Aokasi Umum		8 Jenis	2.970.000
7	01.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Kec.Solokuro	800 Kotak Nasi 50 dus air	18.228.300	Dana Aokasi Umum		800 Kotak Nasi 50 dus air	20.051.130
7	01.01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Solokuro	100%	19.793.000	Dana Aokasi Umum		100%	21.772.300
7	01.01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang tercukupi	Kec.Solokuro	100 buah Kursi Lipat	19.793.000	Dana Aokasi Umum		100 buah Kursi Lipat	21.772.300
7	01.01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya yang tercukupi	Kec.Solokuro	2 Unit Computer Al in one, 2 unit printer , 1 set Sound system, 4 kipas blower, 2 unit Layar Proyektor dan 1 Unit TV	-	Dana Aokasi Umum		2 Unit Computer Al in one, 2 unit printer , 1 set Sound system, 4 kipas blower, 2 unit Layar Proyektor dan 1 Unit TV	20.000.000
7	01.01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Solokuro	100%	193.168.980	Dana Aokasi Umum		100%	212.485.878
7	01.01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Kec.Solokuro	3 Rekening	43.952.980	Dana Aokasi Umum		3 Rekening	48.348.278

7	01.01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Solokuro	3 Unit laptop, 10 unit AC, 10 Unit printer, 11 unit komputer dan 42 Jenis ATK	19.000.000	Dana Aokasi Umum		3 Unit laptop, 10 unit AC, 10 Unit printer, 11 unit komputer dan 42 Jenis ATK	20.900.000
7	01.01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Solokuro	8 orang	130.216.000	Dana Aokasi Umum		8 orang	143.237.600
7	01.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Solokuro	100%	68.227.400	Dana Aokasi Umum		100%	75.050.140
7	01.01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kec.Solokuro	1 Mobil 6 Unit Motor	40.427.400	Dana Aokasi Umum		1 Mobil 6 Unit Motor	44.470.140
7	01.01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec.Solokuro	1 Mobil 6 Unit Motor	6.000.000	Dana Aokasi Umum		1 Mobil 6 Unit Motor	6.600.000
7	01.01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Kec.Solokuro	Pemeliharaan 2 Unit Gedung Kantor, Pavingisasi dan Pembangunan Gedung ARSIP	21.800.000	Dana Aokasi Umum		Pemeliharaan 2 Unit Gedung Kantor, Pavingisasi dan Pembangunan Gedung ARSIP	23.980.000
7	01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase capaian Layanan	Kec.Solokuro	100%	20.201.700	Dana Aokasi Umum		100%	22.221.870

7	01.02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Proentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Solokuro	100%	13.984.200	Dana Aokasi Umum		100%	15.382.620
7	01.02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Solokuro	5 Jenis	13.984.200	Dana Aokasi Umum		5 Jenis	15.382.620
0	01.02	2.03		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	Kec.Solokuro	100%	6.217.500	Dana Aokasi Umum		100%	6.839.250
7	01.02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana Pelayanan Umum	Kec.Solokuro	3 Kegiatan	6.217.500	Dana Aokasi Umum		3 Kegiatan	6.839.250
7	01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec.Solokuro	100%	26.407.300	Dana Aokasi Umum		100%	29.048.030
7	01.03	'02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Kec.Solokuro	100%	14.207.300	Dana Aokasi Umum	100%	100%	15.628.030

7	01.03	02.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	Kec.Solokuro	2 Kali	8.026.300	Dana Aokasi Umum		2 Kali	8.828.930
7	01.03	02.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec.Solokuro	3 Kegiatan	6.181.000	Dana Aokasi Umum		3 Kegiatan	6.799.100
7	01.03	02.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec.Solokuro	100%	12.200.000	Dana Aokasi Umum		100%	13.420.000
7	01.03	02.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pembinaan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang dilaksanakan	Kec.Solokuro	2 Kegiatan	12.200.000	Dana Aokasi Umum		2 Kegiatan	13.420.000
7	01.06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Solokuro	100%	24.918.000	Dana Aokasi Umum		100%	72.600.000
7	01.06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Solokuro	100%	24.918.000	Dana Aokasi Umum		100%	27.409.800
7	01.06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa	Kec.Solokuro	10 Desa	6.181.000	Dana Aokasi Umum		10 Desa	6.799.100

7	01.06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Solokuro	10 Desa	6.181.000	Dana Aokasi Umum		10 Desa	6.799.100
7	01.06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Kec.Solokuro	3 Kegiatan	6.181.000	Dana Aokasi Umum		3 Kegiatan	6.799.100
7	01.06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pembinaan Pengendalian keamanan yang dilaksanakan	Kec.Solokuro	3 Kali	6.375.000	Dana Aokasi Umum		3 Kali	7.012.500
Jumlah								1.972.062.056				2.234.458.462

BAB V

P E N U T U P

- a. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD Kecamatan Solokuro sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Solokuro merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Unit Kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Solokuro dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Solokuro tahun 2025 merupakan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perubahan yang berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Solokuro Tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun

secara umum Rencana Kerja (RENJA) Perubahan OPD Kecamatan Solokuro Tahun 2025 tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Solokuro, Mei 2025
CAMAT SOLOKURO

TRI MUKTAGUNG WIJAYANTO, SE
Pemina
NIP. 19681130 201001 1 00